

MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI BIDANG ADMINISTRASI TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PAGU	REALISASI	REALISASI KINERJA	URAIAN KEGIATAN (UPAY/STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA AKSI)	KENDALA	SOLUSI	PENANGGUNG JAWAB
CONTOH PENGISIAN MATRIKS CAPAIAN :											
	Evaluasi terhadap capaian kinerja tidak dilakukan seluruh satker secara periodik	Januari - Februari	Pendampingan penyusunan LKJIP	1. LKJIP Kemenkumham Tahun 2023 2. LKJIP UKE 1 Tahun 2023 3. LKJIP Kantor Wilayah Tahun 2023 4. LKJIP UPT Tahun 2023	361.620.000	100.000.000	100% (sesuai dengan persentase capaian sampai dengan periode pelaksanaan)	1. Pelaksanaan pendampingan penyusunan LKJIP Kantor Wilayah & LKJIP UPT Tahun 2023 2. Pelaksanaan Penilaian Mandiri SAKIP UPT	Masih terdapat Dokumen LKJIP UPT yang belum sesuai dengan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan LKJIP dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pelaksanaan supervisi kepada seluruh UPT terhadap dokumen LKJIP dan pemenuhan data dukung penilaian SAKIP	Biro Perencanaan APUP Unit Eselon I Kantor Wilayah
SEKRETARIAT JENDERAL											
1	Evaluasi terhadap capaian kinerja tidak dilakukan seluruh satker secara periodik	Januari - Februari	Pendampingan penyusunan LKJIP	1. LKJIP Kemenkumham Tahun 2023 2. LKJIP UKE 1 Tahun 2023 3. LKJIP Kantor Wilayah Tahun 2023 4. LKJIP UPT Tahun 2023	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Biro Perencanaan APUP Unit Eselon I Kantor Wilayah
3	Data pengembangan kompetensi Kemenkumham yang belum dilakukan secara keseluruhan	Januari-Februari	Pemutakhiran Data 2023 indikator : (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan hasil pemutakhiran data 2023	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Biro SDM Unit Eselon I Kanwil IPT
		Januari-Februari	2. Pemetaan Data 2025 (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan pemetaan data 2025			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Biro SDM Unit Eselon I Kanwil UPT
		Januari - Desember	Implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham minimal 25% pegawai per triwulan (Januari s/d Desember)	Laporan triwulan implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Kantor Wilayah dan UPT
4	Belum optimalnya nilai indikator Deviasi Halaman II DIPa dan Penyerapan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian IKPA	April - Juni	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Kantor Wilayah dan UPT
		Julai - September	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024 kepada Kantor Wilayah.			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Kantor Wilayah dan UPT
		Oktober - November	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024 kepada Kantor Wilayah.			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Kantor Wilayah dan UPT
5	Satuan Kerja Tidak Menyampaikan Usulan RKBMN	Junii - Julii	Kantor Wilayah melakukan pendampingan Pra Penyusunan RKBMN	Laporan Kegiatan Pra Penyusunan RKBMN	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Kantor Wilayah
6	Satuan kerja belum menyampaikan Laporan Wasdal tepat waktu dan belum sesuai ketentuan	Januari dan Julii	Menyusun Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester I Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Kantor Wilayah
7	Belum optimalnya kualitas nilai pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Januari	Membuat SK Tim Pengawasan	SK TIM Pengawasan arsip Kantor Wilayah	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Kantor Wilayah
		Januari - Junii	Implementasi pengawasan kearsipan internal sesuai dengan LKE	Laporan implementasi pengawasan kearsipan internal			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Kantor Wilayah
		Julii - Desember	Monitoring dan evaluasi hasil dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal	Laporan money dan rekomendasi hasil pengawasan kearsipan internal			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Kantor Wilayah dan Biro Umum
8	Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 Permenkumham 30/2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Febuari-April	Melakukan pendataan Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melalui aplikasi Simdatis	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Kepala Kantor Wilayah
		Maret-Juni	Melaksanakan rekomendasi hasil verifikasi dan uji keabsahan keamanan oleh Pusdatis	Dokumen perbaikan aplikasi			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
		INSPEKTORAT JENDERAL									
9	Pengawasan atas capaian Prioritas Nasional (PN) belum optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APUP pada setiap Prioritas Nasional Kemenkumham	Triwulan	Laporan Triwulan evaluasi pelaksanaan dari Kanwil ke UKE I, UKE I ke Biro Perencanaan, Biro Perencanaan ke Ijen	Outcome : Capaian Program Prioritas Kementerian Hukum dan HAM tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat Output / Data Dukung dari Ijen: Laporan APUP Hasil Evaluasi Capaian Prioritas Nasional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Unit Eselon I
		Triwulan	Evaluasi Triwulan oleh Ijen				(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
		Triwulan	Penyampaian laporan di Minggu pertama setiap triwulan				(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PAGU	REALISASI	REALISASI KINERJA	URAIAN KEGIATAN (UPAYA/STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA AKSI)	KENDALA	SOLUSI	PENANGGUNG JAWAB
10	Penerapan integritas belum optimal dibuktikan dengan indeks integritas Kementerian Hukum dan HAM yang menurun berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas KPK	Sepanjang tahun	Glorifikasi peningkatan integritas dan budaya anti korupsi Satker yang diputar setiap hari (Berupa rekaman tentang budaya integritas)	Outcome : Meningkatnya Budaya Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dibuktikan dengan perubahan Indeks SPI yang meningkat dari tahun sebelumnya (berdasarkan penilaian KPK) Output / Data Dukung dari Hjen: 1. Matriks Tindak Lanjut hasil Penilaian Integritas (SPI- KPK) Tahun 2023 2. Laporan Pelaksanaan Penguatan/ Sosialisasi atas Survei Penilaian Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 3. Laporan KPK tentang hasil SPI Kemenkumham Tahun 2024	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Inspektorat Jenderal Seluruh UKE I Kantor Wilayah Seluruh UPT
		Triwulan I	Tindak lanjut hasil SPI 2023				(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
		Triwulan II	a.Penetapan responden eksternal dan internal yang tepat. b. Sosialisasi kepada responden eksternal				(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
		Triwulan III	Pelaksanaan Survei oleh KPK				(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
		Triwulan III	Hasil survei				(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI	HASIL	PAGU	REALISASI	REALISASI KINERJA	URAIAN KEGIATAN (UPAYA/STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA AKSI)	KENDALA	SOLUSI	PENANGGUNG JAWAB
1	Pemenuhan Hak Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah	September	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah pilotng oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Ltimas Online	{PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{CAPAIAN SEPTEMBER}	{STATUS PELAKSANAAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan							
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;							
		Oktober	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah pilotng oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Ltimas Online			{CAPAIAN OKTOBER}	{STATUS PELAKSANAAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan							
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;							
		November	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah pilotng oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Ltimas Online			{CAPAIAN NOVEMBER}	{STATUS PELAKSANAAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan							
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;							
		Desember	1) Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK di Lepas dan Rutan wilayah pilotng oleh Balai Pemasyarakatan;			{CAPAIAN DESEMBER}	{STATUS PELAKSANAAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan							
			3) -Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;							
			1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah pilotng oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Ltimas Online							
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan							
			3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;							
			1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah pilotng oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Ltimas Online							
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan							
			3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;							

MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI BIDANG IMGRASI TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI	HASIL	PAGU	REALISASI	REALISASI KINERJA	URAIAN KEGIATAN (UPAY/STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA AKSI)	KENDALA	SOLUSI	PENANGGUNG JAWAB
20	Perluasan pelayanan e-Paspor di seluruh kantor imigrasi.	Januari - Maret 1. Rapat Persiapan Perluasan pelayanan e-paspor 2. Penetapan Kantor Imigrasi penerbit e-Paspor 3. Rapat Pembahasan Pengaturan Distribusi Blangko dan Kuota Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 4. Sosialisasi Perluasan pelayanan e-paspor	1. Notula Rapat Persiapan 2. Penetapan Kantor Imigrasi penerbit e-Paspor 3. Notula Rapat Pembahasan 4. Laporan sosialisasi	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Wilayah
		April - Juni Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
		Juli - September Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
		Oktober - Desember Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
21	Tingginya demand paspor belum dapat diimbangi dengan kapasitas produksi	Januari- Maret 1. Melakukan pemetaan analisa kebutuhan pelayanan paspor dalam di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan	1. Peta analisa kebutuhan pelayanan paspor dalam di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Wilayah
		April-Juni Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis: Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis: Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
		Juli-September Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis: Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis: Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
		Oktober - Desember Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis: Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis: Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
22	Meningkatnya kasus TPPO dan TPPM lintas negara	Januari- Desember 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat (awareness) melalui pengayaan (enrichment) fungsi desa binaan imigrasi 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	1. Laporan Kegiatan 2. Laporan Koordinasi	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Wilayah
23	Pengawasan dan penindakan keimigrasian belum optimal	Januari- Maret 1. Peningkatan target sasaran 2. Peningkatan pengendalian petugas	1. Laporan Peningkatan sasaran 2. Laporan Pengendalian Petugas	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Wilayah
		April-Juni Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait	Laporan Koordinasi			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
		Juli-September Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Laporan Peningkatan sarana dan prasarana pendukung			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	
		Oktober - Desember Evaluasi pelaksanaan tugas	Laporan Evaluasi			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	

MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI BIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PAGU	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI KINERJA	URAIAN KEGIATAN (UPAYA/STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA AKSI)	KENDALA	SOLUSI	HASIL	PENANGGUNG JAWAB
DITJEN PP												
4	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	Januari	Menetapkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan penempatan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonas) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	{PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{CAPAIAN JANUARI}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan penempatan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonas) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Februari	Melakukan koordinasi kegiatankoordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota			{CAPAIAN FEBRUARI}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan: a. dalam hal Karwil menyelenggarakan kegiatan rapat/koordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi; b. dalam hal Karwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, data dukung berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi	
		Maret- November	Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (memasukkan semua berkas ke dalam aplikasi SIPPDAH)			{CAPAIAN MARET- NOVEMBER }	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian pembulatan dan penempatan konsepsi, data dukung berupa: Raperda 1) Surat Permohonan Pengharmonisasian; 2) Penjelasan/Keterangan 3) Raperda yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa 4) SK Tim Pembentukan Tim Penyusun Raperda 5) SK Pembentukan Propempda beserta daftar lampiran Propempda atau SK Keputusan bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propempda. Raperkada 1. Surat Permohonan Pengharmonisasian 2. Penjelasan/Keterangan 3. Raperkada yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa 4. SK Kepala Daerah Propempderkada beserta daftar lampiran Propempderkada	
		Desember	Penyusunan dan Penyampaian Laporan kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah			{CAPAIAN DESEMBER }	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Laporan Kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, Raperda yang berasal dari DPRD, dan Raperkada oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
DITJEN HAM												
2	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Wilayah	Januari	Rapat Koordinasi terkait persiapan pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) BHAM	{PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{CAPAIAN JANUARI}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Laporan hasil koordinasi persiapan pembentukan GTD BHAM	Kadiv Yankum (Bidang HAM)
		Februari	Rapat penyusunan draft SK GTD BHAM			{CAPAIAN FEBRUARI}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Draft SK GTD BHAM	
		Maret	Pengukuhan GTD BHAM sesuai Perpres No. 60 Tahun 2023			{CAPAIAN MARET}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	SK GTD BHAM sesuai Perpres No. 60 Tahun 2023	
		April	Rapat Kesekretariatan GTD BHAM			{CAPAIAN APRIL}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Laporan Rapat Kesekretariatan GTD BHAM	
		Mei	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM			{CAPAIAN MEI}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM	
		Juni	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM			{CAPAIAN JUNI}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI		IMPLEMENTASI	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI KINERJA	URAIAN KEGIATAN (UPAYA/STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA AKSI)	KENDALA	SOLUSI	HASIL	PENANGGUNG JAWAB
2	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Wilayah	Jul	1.a. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 1. b. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(CAPAIAN JULI)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1.a. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 1. b. Laporan pendampingan	Kadiv Yankum (Bidang HAM)
Agustus		1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	(CAPAIAN AGUSTUS)			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan pendampingan		
September		1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA 3. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	(CAPAIAN SEPTEMBER)			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan pendampingan 3. Laporan Pelaksanaan		
Oktober		1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM 2. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	(CAPAIAN OKTOBER)			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. Laporan Monitoring Capaian Aksi dan Implementasi Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Pelaksanaan		
November		1. Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM Daerah 2. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	(CAPAIAN NOVEMBER)			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. Laporan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Pelaksanaan		
Desember		1. Penyampaian Laporan Monev dan Tindak Lanjut Aksi serta Implementasi Pelaksanaan Bisnis dan HAM Daerah 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan BHAM	(CAPAIAN DESEMBER)			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. Laporan Monev dan Tindak Lanjut serta Implementasi Aksi Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran/permasalahan BHAM		
BPM												
2	Belum adanya Dasar Hukum yang kuat, sehingga antusias/partipasi Pemerintah Daerah kurang mendukung baik dalam sarana dan prasana (tidak tersedianya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan tsb)	Maret	1. Rapat persiapan 2. Surat usulan penyampaian Desa/Kelurahan yang akan dijadikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan di setiap wilayah	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(CAPAIAN MARET)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. Surat undangan rapat (Undangan,Absensi ,Notula, Gambar/Dokumentasi) 2. Surat usulan Desa/Kelurahan Binaan dari masing-masing wilayah	KADIV YANKUM
Juni		1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum di masing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Kelompok Kadarkum yang diandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 3. Implementasi kuesioner indeks desa/kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Akses informasi Hukum	(CAPAIAN JUNI)			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. SK Kelompok Kadarkum yang diandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 2. Laporan Pembentukan dan Pembinaan kelompok Kadarkum masing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula, Gambar/Dokumentasi)		
September		1. Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dimasing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Desa/Kelurahan Binaan yang diandatangani oleh Bupati/Walikota 3. Implementasi kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan, Dimensi Akses Demokrasi	(CAPAIAN SEPTEMBER)			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. SK Desa/Kelurahan Binaan yang diandatangani oleh Bupati/Walikota 2. Laporan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dimsing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula dan Gambar/Dokumentasi)		
Desember		Menyusun laporan capaian target Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan dimsing-masing wilayah dan rencana usulan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan tahun berikutnya	(CAPAIAN DESEMBER)			(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Laporan akhir capaian kinerja		

	NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PAGU	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI KINERJA	URAIAN KEGIATAN (UPAYA/STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA AKSI)	KENDALA	SOLUSI	HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	2	Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH harus dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai standar layanan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Bantuan Hukum serta peraturan pelaksanaannya. Capaian realisasi anggaran Bantuan Hukum setiap tahunnya terealisasi secara maksimal, namun dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak hanya dari sisi realisasi anggaran tetapi yang lebih penting adalah terkait kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh PBH. Berdasarkan Indeks Kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan PBH kepada Penerima Bantuan Hukum yang dihasilkan melalui wawancara kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan nilai persepsi atas pelayanan bantuan hukum yang diterimanya, pada tahun 2023 baru dilakukan penilaian kinerja PBH sebanyak 506 PBH dari 619 PBH atau sebesar 81,7 %. Sehingga penilaian kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum perlu ditingkatkan.	Junii	25% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	{PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{CAPAIAN JUNII}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi	KADIV YANKUM
		September	50% (B06: 25% + B09: 25%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum				{CAPAIAN SEPTEMBER}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi	
		Desember	85% (B09: 50% + B12: 35%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum				{CAPAIAN DESEMBER}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi	
		Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di kabupaten/kota. Sebaran PBH setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 di setiap kab/kota baru sebesar sekitar 54% atau sebanyak 279 dari 514 kabupaten, hal ini berdampak pada akses	Maret	Penunjukkan Pokjada Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum	{PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{CAPAIAN MARET}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	SK Tim Pokjada Verifikasi dan Akreditasi	KADIV YANKUM
			Junii	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH baru)			{CAPAIAN JUNII}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Rekomendasi Akreditasi PBH Baru	
			September	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH lama)			{CAPAIAN SEPTEMBER}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Rekomendasi Akreditasi PBH Lama	
			Maret	Sosialisasi Paralegal Justice Award	{PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{CAPAIAN MARET}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Laporan Pelaksanaan sosialisasi	KADIV YANKUM
			Junii	Pelaksanaan seleksi Paralegal Justice Award			{CAPAIAN JUNII}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Usulan peserta Paralegal Academy	
	DITJEN AHU												
1		Belum tersedianya pemutakhiran data Fidusia dalam rangka peningkatan Kualitas layanan Fidusia dan Jumlah Pendaftaran Fidusia	Maret - November	Penyebaran informasi terkait dengan kewajiban penghapusan jaminan fidusia yang telah selesai masa di wilayah	{PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{CAPAIAN MARET - NOVEMBER}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Laporan Penyebaran informasi terhadap terkait pendaftaran, perubahan penghapusan Jaminan Fidusia kepada masyarakat, notaris dan lembaga pembiayaan di wilayah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
2		Masih terdapat Ketidaksinkronan data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Januari - Maret	Kantor Wilayah menghimpun data Notaris untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan database Ditjen AHU	{PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT}	{CAPAIAN JANUARI - MARET}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Laporan Hasil Konfirmasi Data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Ditjen AHU dan Kadiv Yankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
			Mei - Desember	Implementasi Migrasi Data Notaris			{CAPAIAN MEI - DESEMBER}	{REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI}	{STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN}	{KENDALA PELAKSANA KEGIATAN}	{SOLUSI}	Database notaris yang telah sinkron antara Data Ditjen AHU dengan data yang tersedia di Kamel	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PAGU	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI KINERJA	URAIAN KEGIATAN (UPAYA STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA AKSI)	KENDALA	SOLUSI	HASIL	PENANGGUNG JAWAB						
DITJEN KI																		
1	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi Geografis	Maret	1. Koordinasi dengan pemerintah daerah (dinas terkait) memetakan potensi IG yang ada di wilayah 2. Inventarisasi produk IG terdaftar yang ada di wilayah setempat 3. Identifikasi Pihak – pihak yang terkait dengan Penguatan kelembagaan dan pengawasan Indikasi Geografis	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(CAPAIAN MARET)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. Laporan Koordinasi 2. Daftar inventarisasi produk IG 3. Daftar pihak-pihak terkait	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM						
		Agustus	1. Sosialisasi dan pendampingan kepada pemohon, dinas atau pemda setempat terkait dengan produk yang akan diajukan atau sedang dalam proses 2. Terbentuknya Pokja Penguatan kelembagaan dan pengawasan di daerah melalui SK yang ditandatangani oleh Kakanwil Gubernur 3. Menyusun Pedoman dan Standar Pengawasan IG di Daerah dengan Berkordinasi pemerintah daerah (dinas terkait), atau stakeholder terkait lainnya yang ada di daerah										(CAPAIAN AGUSTUS)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. Laporan Hasil Koordinasi 2. SK Pokja per wilayah 3. Dokumen Pedoman dan Standar Pengawasan IG
		September	Pengajuan permohonan Indikasi Geografis baru dan atau menyelesaikan minimal 1 permohonan Indikasi Geografis yang masih dalam proses										(CAPAIAN SEPTEMBER)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Bukti permohonan pendaftaran Indikasi Geografis
		Desember	1. Berkordinasi dengan pemda setempat terkait dengan potensi IG yang dapat diajukan pemohonannya di tahun 2025 2. Tindak lanjut Pokja yang sudah terbentuk										(CAPAIAN DESEMBER)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. Laporan Hasil Koordinasi dan daftar potensi IG tahun 2025 2. Laporan Tindak Lanjut Pokja
Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Merek Kolektif mengakibatkan rendahnya permohonan merek kolektif	Februari - Juni	Diseminasi Merek Kolektif	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(CAPAIAN FEBRUARI - JUNI)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	pemahaman terkait merek kolektif	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM							
	Juli s.d Nov	Pengajuan Pemohonan Pendaftaran Merek Kolektif 1 wilayah 1 merek kolektif			(CAPAIAN JULI S.D NOV)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Laporan dan Bukti Pemohonan 1 Merek Kolektif								
	Desember	Monitoring dan evaluasi			(CAPAIAN DESEMBER)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	laporan monrev terhadap tindak lanjut di Tahun 2025								
Persiapan kerja sama kerah dengan target mitra kementerian dalam negeri, dan koneksi antara Bappenas dengan pemerintah daerah ->diarahkan untuk mendorong pendaftaran IG dari masing-masing daerah	Triwulan 1-2	1) Persiapan penajakan dengan mitra forum Gugus Tugas IG 2) Pembentukan Gugus Tugas Indikasi Geografis sebagai forum koordinasi antara stakeholder lintas Kementerian/Lembaga/Pemda untuk mendorong pendaftaran IG dari wilayah	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(CAPAIAN TRIWULAN 1-2)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. Tim Pusat: SK Bersama? SK Merakumhan? 2. Tim Wilayah: SK Gubernur? SK Kakanwil?	- Direktur KSE - Pokja Kerja Sama Dalam Negeri - Pokja Layanan IG - Kakanwil							
Pemohonan paten dalam negeri yang masih rendah dibandingkan dengan total permohonan paten, sehingga memerlukan upaya untuk mendorong permohonan baru dalam negeri melalui pemanfaatan informasi penelusuran dokumen paten pada 33 provinsi	Januari - Februari	Januari - Februari Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(CAPAIAN JANUARI - FEBRUARI)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Laporan Koordinasi Laporan Calon Peserta Perlu Detail Informasi : - Kategori audiens - Lokasi tempat - Pembagian anggaran	Kantor Wilayah Kemenkumham							
	Maret - Agustus	Maret - Agustus Pelaksanaan kegiatan Asistansi Teknis Pemohonan dan Penelusuran Dokumen Paten			(CAPAIAN MARET - AGUSTUS)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Pemohonan dan Penelusuran Dokumen Paten								
	September	September Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut			(CAPAIAN SEPTEMBER)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Pemohonan dan Penelusuran Dokumen Paten								
Persentase permohonan paten dalam negeri yang tidak bisa digranted yang tinggi, sehingga memerlukan upaya untuk pendampingan penyusunan dokumen permohonan paten yang baik dan benar kepada para calon pemohon paten (asistensi Drafting Paten)	Maret - April	Maret - April Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(CAPAIAN MARET - APRIL)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Laporan Koordinasi Laporan Calon Peserta	Kantor Wilayah Kemenkumham							
	Mei - Oktober	Mei - Oktober Pelaksanaan Kegiatan Asistansi Teknis Paten Drafting			(CAPAIAN MEI - OKTOBER)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting								
	November	November Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut			(CAPAIAN NOVEMBER)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting								

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI KINERJA	URAIAN KEGIATAN (UPAYA/STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA AKSI)	KENDALA	SOLUSI	HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	Tren permohonan desain industri beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi dan penurunan di dalam negeri, serta mulai munculnya beberapa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan mekanisme perlindungan desain industri	Januari B01 : - koordinasi dengan Stakeholder terkait - Membentuk Tim Inventarisasi Data Potensi Desain Industri SK Tim Februari B02 : Koordinasi DJKI dan Kanwil Kumhah secara virtual, dimana DJKI akan menyampaikan petunjuk pelaksanaan inventarisasi data potensi desain industri Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi Maret B03 : Melaksanakan rapat persiapan rencana aksi inventarisasi data potensi desain industri Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi April-Mei B04 – B05 : Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi Juni-Juli B06 – B07 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor industri kreatif Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi Agustus-September B08 – B09 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor pendidikan Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi Oktober B10 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor asosiasi pengusaha atau industri Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi November B11 : Menyampaikan hasil inventarisasi potensi desain industri ke DJKI Laporan Potensi Desain Industri di wilayah	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(CAPAIAN JANUARI)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	B01 : - Laporan koordinasi - SK Tim	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
					(CAPAIAN FEBRUARI)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	B02 : Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi	
					(CAPAIAN MARET)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	B03 : Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi	
					(CAPAIAN APRIL-MEI)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	B04 – B05 : Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi	
					(CAPAIAN JUNI-JULI)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	B06 – B07 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
					(CAPAIAN AGUSTUS-SEPTEMBER)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	B08 – B09 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
					(CAPAIAN OKTOBER)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	B10 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
					(CAPAIAN NOVEMBER)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Laporan Potensi Desain Industri di wilayah	
BADAN STRATEGI KEBUJUKAN											
3	Kualitas penilaian regulasi yang belum merata ditukarkan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penilaian IRH belum optimal	Januari - Februari Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah Maret Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah April-Agustus 1. Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum 2. Verifikasi faktual dan validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah November-Desember Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	(PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(CAPAIAN JANUARI - FEBRUARI)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Laporan Sosialisasi Indeks Reformasi	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
					(CAPAIAN MARET)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	
					(CAPAIAN APRIL-AGUSTUS)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	1. Laporan Hasil Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah 2. Laporan Hasil verifikasi faktual dan validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah	
					(CAPAIAN NOVEMBER-DESEMBER)	(REALISASI KEGIATAN RENCANA AKSI)	(STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN)	(KENDALA PELAKSANA KEGIATAN)	(SOLUSI)	Laporan Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	